MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 381 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-49/MK.02/2021 tanggal 25 Januari 2021;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.65-7/93 tanggal 4 Januari 2021;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021;
4. Surat Bupati Siau Tagulandang Biaro Nomor : 800/196/Sekr-BKPSDM tanggal 29 Desember 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Penetapan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro sejumlah **174** (seratus tujuh puluh empat) dengan rincian Tenaga Guru sejumlah **27** (dua puluh tujuh), Tenaga Kesehatan sejumlah **46** (empat puluh enam), dan Tenaga Teknis sejumlah **101** (seratus satu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

KEDUA : Masa Hubungan Perjanjian Kerja Jabatan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;

KETIGA : Hubungan perjanjian kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan berdasarkan waktu yang paling singkat diantara masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA atau selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang akan diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Kualifikasi pendidikan bagi jabatan guru pada Instansi Pemerintah Daerah merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik Dalam Pendaftaran Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021;

KELIMA : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kabupaten Siau Tagulandang Biaro;

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 21 APRIL 2021

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Tjahjo Kumolo

Tembusan:
1. Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Lampiran
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Nomor : 381 Tahun 2021
Tanggal : 21 April 2021

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2021

TENAGA GURU

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	40104734	SD NEGERI INPRES DAME
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	40104773	SMP NEGERI 5 TAGULANDANG
3.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	40104744	SD NEGERI INPRES TOPE BUANG
4.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	40104676	SD NEGERI INPRES BATUSENGGO
5.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	40104755	SMP NEGERI 1 SIAU BARAT UTARA
6.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	40104762	SMP NEGERI 2 SATAP SIAU BARAT UTARA
7.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	40104771	SMP NEGERI 4 SIAU BARAT
8.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	40104761	SMP NEGERI 2 SATAP BIARO
9.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	40104758	SMP NEGERI 1 TAGULANDANG
10.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	40104770	SMP NEGERI 4 SATU ATAP SIAU TIMUR
11.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	40104755	SMP NEGERI 1 SIAU BARAT UTARA
12.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	40104677	SD NEGERI INPRES LAGHAENG
13.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	40101479	SD NEGERI TOPE
14.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	40104724	SD NEGERI BOTO
15.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	40104736	SDN INPRES KARUNGO
16.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	40104735	SD NEGERI INPRES HAASI HUMBIA
17.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	40104734	SD NEGERI INPRES DAME
18.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	40104637	SD NEGERI INPRES WINANGUN
19.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	40104831	SMP NEGERI 2 SATAP TAGULANDANG SELATAN
20.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	40104676	SD NEGERI INPRES BATUSENGGO
21.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	40104703	SD NEGERI APELAWO
22.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	40104766	SMP NEGERI 2 TAGULANDANG
23.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	40104755	SMP NEGERI 1 SIAU BARAT UTARA
24.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1	40104753	SMP NEGERI 1 SIAU BARAT
25.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1	40104771	SMP NEGERI 4 SIAU BARAT
26.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1	40104766	SMP NEGERI 2 TAGULANDANG
27.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	40104759	SMP NEGERI 1 TAGULANDANG-UTARA
	TOTAL	27		

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	1	0	P7108010101	PUSKESMAS BIARO
2.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	1	0	P7108090201	PUSKESMAS ULU
3.	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	0	P7108070101	PUSKESMAS ONDONG
4.	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	0	P7108090102	PUSKESMAS LIA
5.	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	0	P7108060202	PUSKESMAS BUHIAS
6.	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	2	0	P7108090102	PUSKESMAS LIA
7.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P7108010101	PUSKESMAS BIARO
8.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P7108100101	PUSKESMAS HIUNG
9.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P7108050201.	PUSKESMAS TALAWID
10.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P7108060202	PUSKESMAS BUHIAS
11.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	R7103026	RSUD Lapangan Sawang Kab. Sitaro
12.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	DOKTER SPESIALIS ANAK	1	0	R7108037	RSUD TAGULANDANG
13.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESI	DOKTER SPESIALIS ANESTESI	1	0	R7103026	RSUD Lapangan Sawang Kab. Sitaro
14.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	0	R7108037	RSUD TAGULANDANG
15.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	0	R7103026	RSUD Lapangan Sawang Kab. Sitaro
16.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	0	R7103026	RSUD Lapangan Sawang Kab. Sitaro
17.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	S-1 GIZI / D-IV GIZI	1	0	P7108080201	PUSKESMAS SALILI
18.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	S-1 GIZI / D-IV GIZI	1	0	P7108040101	PUSKESMAS MINANGA
19.	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	D-IV PERAWAT ANESTESI	1	0	R7103026	RSUD Lapangan Sawang Kab. Sitaro
20.	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	0	P7108070102	PUSKESMAS MAKALEHI
21.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	3	0	R7103026	RSUD Lapangan Sawang Kab. Sitaro
22.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	1	0	P7108090201	PUSKESMAS ULU
23.	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	0	P7108090201	PUSKESMAS ULU
24.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	0	P7108050201.	PUSKESMAS TALAWID
25.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	0	P7108030101.	PUSKESMAS TAGULANDANG
26.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	4	0	R7108037	RSUD TAGULANDANG
27.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	0	R7103026	RSUD Lapangan Sawang Kab. Sitaro
28.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIS / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	0	R7103026	RSUD Lapangan Sawang Kab. Sitaro
29.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIS / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	0	R7108037	RSUD TAGULANDANG
30.	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIOGRAFI / D-III RADIOLOGI / D-III KESEHATAN BIDANG RADIODIAGNOSTIK/RADIOGRAFI	1	0	R7103026	RSUD Lapangan Sawang Kab. Sitaro
31.	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIOGRAFI / D-III RADIOLOGI / D-III KESEHATAN BIDANG RADIODIAGNOSTIK/RADIOGRAFI	1	0	R7108037	RSUD TAGULANDANG
32.	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	2	0	P7108100101	PUSKESMAS HIUNG
33.	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	0	P7108030101.	PUSKESMAS TAGULANDANG

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
34.	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	0	P7108060201	PUSKESMAS SAWANG
35.	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	D-III TRANSFUSI DARAH / D-III TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH	1	0	R7103026	RSUD Lapangan Sawang Kab. Sitaro
36.	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	D-III TRANSFUSI DARAH / D-III TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH	1	0	R7108037	RSUD TAGULANDANG
		TOTAL	46	0		

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
MELAYANI MASYARAKAT
DAN REFORMASI BIROKRASI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 ARSITEKTUR / S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA	3	0	INSPEKTORAT | INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH II
2.	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 ARSITEKTUR / S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA	2	0	INSPEKTORAT | INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH I
3.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI	2	0	INSPEKTORAT | INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH III
4.	AHLI PERTAMA - POLISI PAMONG PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU POLITIK	4	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT | SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
5.	PEMULA - POLISI PAMONG PRAJA	SLTA / SMK / SMA	30	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT | SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
6.	ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK	1	0	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI | SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI
7.	ANALIS ALAT PENANGKAP IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN	S-1 PERIKANAN / S-1 ILMU KELAUTAN	1	0	DINAS PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN TANGKAP | SEKSI PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
8.	ANALIS ANGKUTAN DARAT	S-1 EKONOMI / D-IV MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT	1	0	DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | SEKSI ANGKUTAN
9.	ANALIS ASET DAERAH	S-1 EKONOMI / S-1/D-IV AKUNTANSI / S-1/D-IV MANAJEMEN	1	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG BARANG MILIK DAERAH | SUB BIDANG MANAJEMEN BARANG MILIK DAERAH DAN ANALIS KEBUTUHAN
10.	ANALIS ASET DAERAH	S-1 EKONOMI / S-1/D-IV AKUNTANSI / S-1/D-IV MANAJEMEN	1	0	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH | SUB BIDANG EKONOMI KEUANGAN DAN ASET DAERAH
11.	ANALIS BAHAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA | BIDANG TENAGA KERJA | SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
12.	ANALIS BENCANA	S-1/D-IV TEKNIK SIPIL	1	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAP-SIAGAAN | SUB BIDANG PENCEGAHAN
13.	ANALIS DAMPAK SOSIAL	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI	1	0	DINAS SOSIAL | BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | SEKSI PELINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL
14.	ANALIS DIKLAT	S-1/D-IV MANAJEMEN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	2	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN APARATUR | SUB BIDANG DIKLAT PENJENJANGAN, DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN SERTIFIKASI
15.	ANALIS GIZI	S-1 GIZI / D-IV GIZI	2	0	DINAS KESEHATAN | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT
16.	ANALIS KEPEMUDAAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK	1	0	DINAS PENDIDIKAN | BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA | SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA
17.	ANALIS MITIGASI BENCANA	S-1/D-IV TEKNIK SIPIL	1	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAP-SIAGAAN | SUB BIDANG PENCEGAHAN
18.	ANALIS MITIGASI BENCANA	S-1/D-IV TEKNIK SIPIL	1	0	DINAS SOSIAL | BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM
19.	ANALIS OBJEK WISATA	S-1/D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN PARIWISATA / S-1/D-IV MANAJEMEN / D-IV MANAJEMEN PARIWISATA	1	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI KEPARIWISATAAN | SEKSI TATAKELOLA DESTINASI, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KEMITRAAN DAN INVESTASI USAHA PARIWISATA
20.	ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	S-1 EKONOMI / D-IV EKONOMI	1	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PENDAPATAN DAERAH | SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH
21.	ANALIS PENDAPATAN DAERAH	S-1/D-IV AKUNTANSI / S-1/D-IV EKONOMI AKUNTANSI	1	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH | SUB BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN
22.	ANALIS PENGUJIAN KELAIKAN KAPAL PERIKANAN	S-1/D-IV TEKNIK MESIN	1	0	DINAS PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN TANGKAP | SEKSI PENERBITAN SURAT IJIN USAHA PERIKANAN
23.	ANALIS PENYAKIT MENULAR	S-1 ANALIS KESEHATAN / D-IV ANALIS KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	0	DINAS KESEHATAN | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
24.	ANALIS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1/D-IV TEKNIK KOMPUTER / S-1/D-IV SISTEM INFORMASI	1	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI | SUB BIDANG PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN
25.	ANALIS PERENCANAAN WILAYAH PERUMAHAN	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	2	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | SEKSI PENGATURAN PELAKSANAAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
26.	ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN	S-1 ILMU HUKUM / S-1 PSIKOLOGI	1	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG KUALITAS KELUARGA
27.	ANALIS PRASARANA PERKOTAAN DAN PEDESAAN	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH	1	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | SEKSI FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
28.	ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	0	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH | SUB BIDANG PEMBINAAN SDM DAN INOVASI DAERAH
29.	ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL	S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI	1	0	DINAS SOSIAL | BIDANG REHABILITASI SOSIAL | SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
30.	ANALIS SOSIAL BUDAYA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 SOSIOLOGI	1	0	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA | SUB BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA
31.	ANALIS SURVEI, PENGUKURAN, DAN PEMETAAN	S-1/D-IV TEKNIK SIPIL	1	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN | BIDANG PERTANAHAN | SEKSI SURVEY PENGUKURAN DAN PEMETAAN LAHAN
32.	PENATA LAPORAN KEUANGAN	S-1/D-IV AKUNTANSI / S-1/D-IV EKONOMI AKUNTANSI	1	0	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN, PROGRAM DAN KEUANGAN | SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN
33.	PENGAWAS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1/D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	2	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | SEKSI PROGRAM DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
34.	PENGAWAS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1/D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	2	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
35.	PENGELOLA KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	1	0	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | SUB BAGIAN PEREKONOMIAN
36.	PENGELOLA LOGISTIK	D-III KOMPUTER / D-III ADMINISTRASI / D-III EKONOMI	1	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK | SUB BIDANG LOGISTIK
37.	PENGELOLA PERPUSTAKAAN	D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI	1	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | BIDANG PERPUSTAKAAN | SEKSI PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN, LAYANAN, OTOMASI DAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN
38.	PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH	D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN DAN PERBANKAN	1	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PENDAPATAN DAERAH | SUB BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
39.	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	D-III KOMPUTER / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI	1	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT | SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI
40.	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	D-III KOMPUTER / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI	1	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG PENGELOLAAN INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA TIK
41.	PENGELOLA SITUS ATAU WEB	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG PENGELOLAAN INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA TIK
42.	PENGELOLA SITUS ATAU WEB	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT | SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI
43.	PENYULUH BENCANA	S-1 SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI	1	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAP-SIAGAAN | SUB BIDANG PENCEGAHAN
44.	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	1	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN | SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
45.	PENYULUH PENANGANAN MASALAH SOSIAL	S-1 SOSIAL / S-1 ADMINISTRASI	1	0	DINAS SOSIAL | BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN | SEKSI PENDAMPINGAN, BANTUAN STIMULASI DAN PENATAAN LINGKUNGAN
46.	PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	0	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM | SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM
47.	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	S-1 KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
48.	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	0	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM | SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
49.	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG BARANG MILIK DAERAH | SUB BIDANG INVENTARISASI
50.	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN	1	0	KECAMATAN TAGULANDANG | SEKRETARIAT KECAMATAN TAGULANDANG | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
51.	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN	1	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN | SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
52.	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN	1	0	KECAMATAN TAGULANDANG UTARA | SEKRETARIAT KECAMATAN TAGULANDANG UTARA | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
53.	PENYUSUN RISALAH	S-1 ILMU HUKUM	1	0	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN | SUB BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH DAN PROTOKOL
54.	PERANCANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1/D-IV TEKNIK KOMPUTER / S-1/D-IV SISTEM INFORMASI	1	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI | SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI
55.	TEKNISI GEDUNG ATAU BANGUNAN	D-III TEKNIK SIPIL	1	0	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH | SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PELAPORAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
56.	TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN	D-III TEKNIK ELEKTRO / D-III TEKNIK LISTRIK	3	0	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
57.	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III KEUANGAN DAN PERBANKAN	1	0	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
		TOTAL	101	0	

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo